

LAPORAN DELEGASI



8TH MIKTA SPEAKER'S CONSULTATION

6 – 10 MARET 2023
ISTANBUL - TURKIYE



Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

8th MIKTA Speakers' Consultation diadakan di Istanbul pada tanggal 9 Maret 2023, yang diselenggarakan oleh Majelis Agung Nasional Türkiye, dengan mengambil "*Multilateralism, Global Interdependence and Parliaments.*"

MIKTA merupakan forum konsultasi kelompok negara menengah dan kerja sama *lima negara* yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Seluruh perwakilan dari Parlemen Anggota MIKTA, yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turkiye and Australia, menghadiri pertemuan penting tersebut di Istanbul, Turkiye.

Pertemuan 8th MIKTA Speakers' Consultation tersebut terdiri dari lima sesi setelah upacara pembukaan untuk memfasilitasi pertukaran ide dan perspektif yang produktif dan bermakna di antara negara-negara peserta. Kehadiran dan partisipasi DPR RI dalam 8th MIKTA Speaker's Consultation ini juga merupakan pengejawantahan dari sejumlah Undang-Undang yang mengatur mengenai wewenang bagi DPR RI untuk melaksanakan diplomasi parlemen, dalam rangka memperkuat diplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah RI.

Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau biasa disebut UU MD3, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa tiga fungsi DPR RI (pengawasan, penganggaran, legislasi) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUSUNAN DELEGASI

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI ke Sidang 8th MIKTA Speaker's Consultation adalah sebagai berikut:

1.	Dr. (H.C.) Puan Maharani	F-PDIP/A-188	Ketua DPR RI /Ketua Delegasi
2.	Charles Honoris	F-PDIP/A-162	Anggota Delegasi
3.	Sudin, S.E.	F-PD/A-151	Anggota Delegasi

Selama persidangan berlangsung, Delegasi DPR RI didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Dr. Indra Iskandar, Kepala Biro KSAP, Endah Retnoastuti, Staff Khusus Ketua DPR RI, Toffery Primanda *Soetikno*, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turkiye, Lalu Muhammad Iqbal serta Pejabat dan Staff Setjen DPR RI, dan Pejabat dan Staff Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turkiye.

MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Maksud dari pengiriman Delegasi DPR RI mengikuti 8th MIKTA Speakers Consultation adalah:

- a. Memperkuat persahabatan dan meningkatkan kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dengan Parlemen Anggota MIKTA.
- b. Mendorong MIKTA untuk memberikan solusi terhadap berbagai tantangan-tantangan global dan kawasan sehingga dapat meningkat relevansi dan kredibilitas MIKTA.

Sedangkan tujuan dari pengiriman Delegasi DPR RI ke 8th MIKTA Speakers Consultation adalah :

- a. Penguatan peran diplomasi parlemen Indonesia, dan dalam hal ini DPR RI
- b. Mempelajari lebih dalam dan mencatat terkait penyelenggaraan MIKTA Speakers' Consultation untuk mensukseskan penyelenggaraan 9th MIKTA Speakers Consultation selanjutnya di Indonesia.
- c. Mengembangkan strategi bersama dengan Parlemen Anggota MIKTA lainnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara global dan implementasikan pernyataan bersama yang telah dihasilkan dalam MIKTA Speakers' Consultation.

PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian kegiatan dilakukan pada masa persiapan partisipasi Delegasi DPR RI pada 8th MIKTA Speakers' Consultation di Istanbul, Turkiye baik persiapan teknis maupun persiapan substansi. Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat DPR RI, termasuk Sekretariat BKSAP menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi keikutsertaan Delegasi.

Sementara dari segi substansi, Staff Khusus DPR RI beserta Tenaga Ahli BKSAP telah menyusun posisi delegasi, dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Luar Negeri RI.

ISI LAPORAN

AGENDA SIDANG

8th MIKTA Speakers' Consultation yang dihadiri oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, mempunyai agenda acara sebagai berikut:

WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 9 Maret 2023	
10.00 – 10.10	Opening of the 8th MIKTA Speakers' Consultation
10.10 – 10.50	Session 1 (Theme: Reforming the International System: Justice, Pluralism and Inclusiveness) (Moderator: Speaker of the Grand National Assembly of Türkiye Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP)
10.50 – 11.00	Coffee break
11.00 – 11.40	Session 2 (Theme: International Migration: Opportunities and Challenges) (Moderator: Mexico)
11.40 – 12.00	Family photo
12.00 – 14.00	Lunch to be hosted by the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP in honor of the participants
14.00 - 14.40	Session 3 (Theme: Food Security, Supply Chains, Poverty, and Climate Change: The Role of Parliaments for Good Governance) (Moderator: Indonesia)
14.40 – 14.50	Coffee Break

14.50 – 15.30	Session 4 (Theme: Responsible AI and Emerging Technologies: Opportunities and Risks) (Moderator: Republic of Korea)
15.30 – 15.40	Coffee Break
15.40 – 16.20	Session 5 (Theme: Parliamentary Diplomacy and Global Interdependence in a Rapidly Changing Global Landscape) (Moderator: Australia)
16.20 – 17.00	Coffee Break
16.30 – 17.00	Closing Session and Adoption of the Joint Declaration

SITUASI UMUM PERSIDANGAN

8th MIKTA Speakers' Consultation dengan tema "*Multilateralism, Global Interdependence and Parliaments.*" berlangsung secara luring di Istanbul, Turkiye pada tanggal 9 Maret 2023. Pertemuan ini terdiri dari lima sesi diskusi. Setiap sesi akan dipimpin oleh Ketua Majelis dari negara peserta, sebagai berikut:

- Sesi I: Turkiye (Speaker of the Grand National Assembly of Turkiye, Mustafa Şentop)
- Sesi II: Meksiko (Member of the Mexican Chamber of Deputies, Noemi Berenice Luna Ayala)
- Sesi III: Indonesia (Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani)
- Sesi IV: Korea Selatan (Speaker of South Korean National Assembly, Kim Jin-Pyo)
- Sesi V: Australia (Deputy President of the Australian Senate, Andrew McLachlan)

Ketua Parlemen yang memimpin sidang berhak berbicara selama 7 menit, sedangkan Ketua atau anggota parlemen negara lain berhak berbicara selama 5 menit.

Setiap parlemen anggota MIKTA akan menjadi ketua sidang pada satu sesi. Urutan pidato akan ditentukan berdasarkan abjad berdasarkan nama negara dalam bahasa Inggris, dimulai dengan nama negara ketuanya. Di akhir setiap sesi, setelah pidato selesai, peserta didorong untuk memberikan kontribusi singkat selama waktu mengizinkan.



Diskusi ini dimulai setelah upacara pembukaan untuk memfasilitasi pertukaran ide dan perspektif yang produktif dan bermakna di antara negara-negara peserta dengan topik yang berbeda, sebagai berikut:

1. Reforming the International System: Justice, Pluralism and Inclusiveness

Sesi pertama dari the 8th MIKTA Speakers' Consultation bertema "*Reforming the International System: Justice, Pluralism and Inclusiveness*".

Dalam sesi ini, para Ketua Parlemen anggota MIKTA memfokuskan pada dunia yang sedang melewati masa kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Saat ini, situasi keamanan global menghadapi berbagai konflik dan peperangan yang terjadi di berbagai wilayah di dunia. Sementara itu, dampak global dari tantangan dan ancaman politik, sosial dan ekonomi juga mempengaruhi negara dan masyarakat.

Faktanya, pada saat seperti ini, sistem internasional dan lembaga-lembaganya, yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah, mencegah kekerasan, dan memulihkan perdamaian dan stabilitas dunia, masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dunia. Dengan tidak adanya keinginan dan tindakan multilateral yang kuat, sebagian besar pihak menggunakan cara-cara unilateral, yang akhirnya prinsip multilateralisme kini terancam.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga dan aktor-aktor sistem internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, memerlukan reformasi dalam struktur dan proses

pengambilan keputusan yang ada. Dengan mempertemukan negara-negara dengan pengalaman berbeda, MIKTA mempunyai kapasitas untuk memainkan peran sebagai pemandu dalam arah ini.

2. International Migration: Opportunities and Challenges

Sesi kedua diskusi dari the 8th MIKTA Speakers' Consultation berjudul "*International Migration: Opportunities and Challenges*".

Sesi diskusi melibatkan seluruh Ketua Delegasi Parlemen Anggota MIKTA, dan berfokus pada isu migrasi. Tahun 2022 membawa titik balik penting dalam sejarah umat manusia di dunia, dan menurut perhitungan pada bulan November 2022 untuk pertama kalinya dalam sejarah, jumlah penduduk dunia melebihi 8 miliar.

Sejalan dengan tren ini, permasalahan seperti perang; terorisme; kekeringan, banjir dan bencana lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim; bencana alam; kemiskinan; pembatasan akses terhadap pangan dan air bersih; dan ketidakstabilan politik, yang cenderung meningkat secara signifikan, dan menyebabkan adanya peningkatan migrasi internasional. Migrasi internasional memiliki dampak pada negara dan wilayah secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya, serta dapat menimbulkan dampak positif atau negatif.

Peran negara-negara MIKTA sangat penting untuk mengevaluasi migrasi internasional, yang berdampak pada negara asal, negara transit, dan negara tujuan akhir dalam segala aspek, untuk menentukan kebijakan masa depan dan terutama mengatasi dimensi kemanusiaan dan hak asasi manusia dari fenomena ini.

3. "Food Security, Supply Chains, Poverty, and Climate Change: The Role of Parliaments in Good Governance"

Sesi ke-3 dari di 8th MIKTA Speakers Consultation bertema "*Food Security, Supply Chains, Poverty, and Climate Change: The Role of Parliaments in Good Governance*", dan dipimpin oleh Ketua DPR-RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani.

Sesi ke-3 ini mendiskusikan bahwa pandemi, konflik maupun peperangan yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dianggap bersifat regional dapat dengan mudah berubah menjadi krisis yang berdampak pada seluruh dunia. Pandemi Covid-19, konflik di Ukraina, dan ketidakseimbangan produksi akibat perubahan iklim mempengaruhi seluruh dunia sebagai faktor yang melemahkan ketahanan pangan dan rantai pasokan.

Mengingat kelompok yang paling terkena dampak permasalahan ini adalah kelompok dengan pendapatan rendah, maka negara dan pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi krisis yang berdampak pada seluruh dunia.

Pada sesi ini, Ketua DPR membahas peran parlemen dalam mengatasi dampak krisis, berbagi contoh tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan contoh kegiatan legislatif, khususnya mengenai ketahanan pangan, rantai pasokan dan pengentasan kemiskinan, dan kontribusi pada pembangunan dunia yang lebih baik. Perspektif bersama dari negara-negara MIKTA juga akan membuka jalan bagi kerja sama regional dan global.

4. “Responsible AI and Emerging Technologies: Opportunities and Risks”

Sesi ke-4 persidangan mendiskusikan “*Responsible AI and Emerging Technologies: Opportunities and Risks*”. Pembahasan mengenai teknologi baru dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dihadirkan khususnya untuk melihat peluang dan menghindari risiko dari teknologi tersebut yang akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari di segala bidang.

Teknologi-teknologi baru tersebut tidak hanya akan mengubah kehidupan manusia sehari-hari tetapi juga mengubah dunia. Transformasi ini, juga memiliki dampak terhadap hubungan internasional dan politik dunia, dan membutuhkan aturan yang lebih jelas.

Oleh karena itu, para pengambil keputusan di level nasional dan internasional harus berupaya menyiapkan pedoman penggunaan teknologi baru demi kepentingan umat manusia dan mengembangkan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Hal ini menjadi prioritas utama dalam pertemuan ini, dengan focus untuk mengatasi risiko yang akan terjadi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi baru guna menghindari situasi yang mengancam kehidupan manusia namun tidak mengekang kebebasan untuk peningkatan teknologi kedepannya.

Meskipun sudah ada upaya untuk mengatur wilayah ini, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan sedang mengembangkan peraturan mereka sendiri, dengan memetakan wilayah yang belum dipetakan dengan cara aturan mereka sendiri. Pertukaran pengalaman di antara negara-negara MIKTA akan berkontribusi dalam bergerak menuju kemajuan teknologi dengan lebih aman.

5. “Parliamentary Diplomacy and Global Interdependence in a Rapidly Changing Global Landscape”

Sesi terakhir dari diskusi berfokus pada topik “*Parliamentary Diplomacy and Global Interdependence in a Rapidly Changing Global Landscape*”.

Dunia saat ini lebih saling terhubung dibandingkan sebelumnya. Bangkitnya globalisasi dan teknologi telah memungkinkan terjadinya tingkat perdagangan, komunikasi, dan mobilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menjadikan dunia kita menjadi tempat yang lebih saling bergantung.

Saling ketergantungan ini telah menciptakan peluang dan tantangan. Semakin jelas bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi tantangan-tantangan ini sendirian. Diplomasi parlemen telah menjadi alat penting untuk terlibat dalam dialog dan kerja sama global, terutama mengingat semakin kompleksnya tantangan global.

Parlemen dapat memainkan peran dalam membentuk hubungan internasional yang baik dan memajukan kepentingan negaranya dengan mengadopsi pendekatan proaktif dan strategis dalam diplomasi parlemen. Negara-negara MIKTA memainkan peran penting dalam mendorong diplomasi parlemen dan mengatasi saling ketergantungan global. Oleh karena itu, 8th MIKTA Speakers' Consultation memberikan kesempatan bagi negara-negara tersebut untuk berbagi perspektif, praktik terbaik, dan pembelajaran dalam konteks ini.

Selain sesi diskusi, 8th MIKTA Speakers' Consultation juga memberikan peluang untuk parlemen anggota MIKTA untuk mendiskusikan Joint Statement atau pernyataan bersama, yang pada akhirnya dapat disetujui di sesi akhir acara.

Selain itu, 8th MIKTA Speakers' Consultation juga memberikan peluang untuk parlemen Anggota MIKTA untuk melakukan pertemuan bilateral di sela-sela acara. Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Agung Nasional Turkiye, Prof. Dr. Mustafa Sentop, sekaligus menyerahkan bantuan untuk para korban gempa yang terjadi pada bulan Februari di Turkiye.

PARTISIPASI DELEGASI DPR-RI



Delegasi DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian persidangan 8th MIKTA Speakers Consultation dengan uraian sebagai berikut:

1. Reforming the International System: Justice, Pluralism and Inclusiveness

Pada sesi ini, Ketua DPR-RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani memberikan pidatonya yang diawali dengan menyampaikan rasa belasungkawa atas korban jiwa dan mereka yang terluka akibat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2023.

Setelah itu, Ketua DPR RI, dalam pidatonya, menggaris bawahi tantangan-tantangan global saat ini yang perlu diatasi secara bersama. Disaat dampak pandemi belum mereda, kita mengalami perang di Ukraina, meningkatnya rivalitas antar kekuatan besar, terjadinya masalah kelangkaan pangan dan energi, serta tingginya inflasi. Di saat bersamaan, dampak pemanasan global menjadi lebih sering dan lebih buruk. Semua masalah tersebut saling terkait dan akan semakin berdampak negatif, jika tidak ditangani secara cepat.

Di sisi lain, disaat kita memerlukan langkah bersama, dunia menghadapi perpecahan dari perbedaan sistem politik, *decoupling* ekonomi, disrupsi mata rantai global, hingga

permasalahan “*digital divide*”. Selain itu, PBB, terutama Dewan Keamanan, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai representasi sistem multilateral dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi abad ke 21. Tantangan yang dihadapi saat ini tentu memerlukan arsitektur sistem internasional yang dapat menjawab semakin kompleksnya tantangan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa kita perlu merevitalisasi sistem multilateral agar tetap relevan dalam mengatasi berbagai masalah dunia abad 21. Kita perlu membuat *global governance* lebih inklusif, representatif, efektif, dan akuntabel.

Dalam hal ini, PBB, IMF, Bank Dunia, dan WTO harus semakin responsif dan adaptif untuk berperan sesuai dengan keinginan seluruh anggotanya. Sistem multilateral harus dapat merepresentasikan, bermanfaat bagi rakyat, dan berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti mengatasi perang, kemiskinan, pandemi, masalah ekonomi.

Berbagai kawasan telah memiliki organisasi regional yang berperan efektif. Karenanya sistem multilateral juga perlu memberi tempat dan mendorong penyelesaian berbagai masalah antar negara pada tingkat regional. Sehingga tidak semua isu perlu diselesaikan pada tingkat global.

Hal ini sejalan dengan seruan Sekjen PBB untuk membentuk *networked multilateralism* yang merupakan jaringan antara PBB, lembaga ekonomi keuangan, dan organisasi regional untuk memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Selain itu, negara-negara dapat berkontribusi melalui inisiatifnya masing-masing, untuk meningkatkan kerja sama melalui berbagai forum internasional. G20 telah menjadi forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional dengan representasi negara dengan ekonomi maju dan negara dengan ekonomi berkembang yang mewakili 80% GDP dunia.

MIKTA sebagai kekuatan menengah juga perlu menyuarakan perlunya mendorong terbentuknya tata dunia abad 21 yang lebih inklusif dan representatif. MIKTA telah menunjukkan bagaimana negara dari kawasan berbeda, dan latar belakang berbeda dapat membentuk forum baru untuk membahas berbagai masalah dunia.

Sebagai tambahan, dalam hal belum terjadi revitalisasi sistem multilateral maka semua negara perlu menegaskan kembali ketaatannya kepada hukum internasional, piagam PBB, dan penghargaan kepada integritas teritori masing-masing negara.

Negara-negara juga perlu menegaskan perlunya untuk menolak penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Negara pemilik nuklir juga harus menegaskan tidak akan gunakan senjata nuklir, jika sedang bersengketa dengan negara lain. Selain itu, perlu untuk

mendorong terbentuknya saling kepercayaan antar negara (*confidence and trust building*) yang dibutuhkan disaat dunia menghadapi meningkatnya rivalitas kekuatan besar.

Di akhir pidatonya, sang Ketua DPR RI, menggarisbawahi pentingnya diplomasi parlemen yang juga harus menjadi bagian dari multilateralisme abad-21. Diplomasi abad 21 merupakan diplomasi yang lebih inklusif yang melibatkan berbagai aktor (diplomasi oleh berbagai pemangku kepentingan). Keterlibatan Parlemen pada berbagai pembahasan isu global dapat meningkatkan legitimasi politik luar negeri masing-masing negara, dan juga legitimasi kesepakatan internasional.

Dr. (H.C.) Puan Maharani juga mengajak kita semua untuk terus melanjutkan dialog guna memberikan kontribusi untuk merevitalisasi sistem multilateral yang sesuai dengan tantangan abad 21.

2. International Migration: Opportunities and Challenges

Pada sesi ini, Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, dalam pidatonya menyampaikan bahwa migrasi dan pengungsian telah menjadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia sepanjang sejarah manusia, dan beberapa mencari peluang ekonomi untuk bertahan hidup. Beberapa terpaksa meninggalkan rumahnya karena konflik dan peperangan, dan beberapa menghindari dampak dari perubahan iklim.

Tidak dapat dipungkiri bahwa angka dari migrasi internasional, termasuk pengungsi dan pencari suaka dapat terus bertambah, apa lagi perang yang terjadi di Ukraina dan krisis di Myanmar diantara lainnya, masih di depan mata. Dr. (H.C.) Puan Maharani menggarisbawahi bahwa mengejar peluang, martabat, kebebasan, dan kehidupan yang lebih baik merupakan sebuah hak asasi manusia, yang patut untuk kita hormati dan lindungi, dan Indonesia terus konsisten mengedepankan prinsip kemanusiaan dengan menerapkan prinsip *non-refoulement* dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam hal ini, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa penting untuk komunitas internasional untuk secara bersama untuk mengatasi akar dari permasalahan yang menyebabkan mereka meninggalkan negara aslinya. Di saat yang bersamaan kita juga harus memecahkan masalah yang dihadapi oleh para migran dan pengungsi seperti perdagangan manusia.

Membantu memecahkan masalah-masalah terkait pengungsian dan migrasi tidak hanya dapat mewujudkan repatriasi dalam kondisi yang aman dan bermartabat, akan tetapi juga menjadi kunci untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, kita juga perlu mendukung kepemimpinan dan bekerja sama dengan UNHCR sebagai badan internasional dengan mandat perlindungan dan pemberian solusi bagi para pengungsi dan pencari suaka, serta IOM. Negara dan Parlemen tidak mungkin bekerja sendiri untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut. Dibutuhkan pihak-pihak lain untuk memberikan solusi atas isu migrasi dan pengungsi yang sedang terjadi di dunia.

Dr. (H.C.) Puan Maharani juga menyatakan bahwa kita perlu memperkuat kerja sama antara negara *transit* dan juga negara tujuan akhir. Kerja sama dan koordinasi kedua belah pihak perlu dilaksanakan guna memastikan keselamatan para migran dan pengungsi sampai ke negara yang diharapkan.

Sebagai tambahan, diplomasi parlemen perlu ditonjolkan lebih jauh, karena kita perlu berbagi pandangan dan juga pengalaman, dan mendukung berbagai mekanisme bilateral, regional, dan multilateral dalam menyelesaikan isu migrasi, pengungsian, dan pencari suaka.

3. “Food Security, Supply Chains, Poverty, and Climate Change: The Role of Parliaments in Good Governance”

Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, memimpin sidang sesi ke-3 ini yang bertema “Food Security, Supply Chains, Poverty, and Climate Change: The Role of Parliaments in Good Governance”.

Dalam pembukaannya, Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan bahwa dunia tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, diakibatkan oleh pandemi, perubahan iklim, ketidakpastian perekonomian, dan krisis kemanusiaan.

Ketua DPR RI menyoroti konflik di Ukraina yang masih berlangsung dan belum menemukan titik penyelesaian dari kelangkaan pangan yang menyebabkan adanya lonjakan harga dan yang akhirnya mengganggu rantai pasok global. Selain itu, kondisi kelangkaan pangan diperburuk oleh dampak perubahan iklim yang meluas dan tak dapat dikendalikan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong terwujudnya sistem dan kerangka pangan global yang berkelanjutan, inklusif, dan resilien, yang memprioritaskan, di antara lainnya, stabilitas harga pangan, cadangan pangan strategis, dan dampak isu geopolitik dan perubahan iklim kepada produksi pangan.

Dr. (H.C.) Puan Maharani juga menyampaikan pentingnya memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian berlangsung secara terbuka, adil, transparan, dan tanpa diskriminasi, dan juga mendorong adanya bantuan keuangan dan teknis guna meningkatkan produksi dan distribusi pangan, khususnya di negara-negara berkembang.

Selain itu, kita memerlukan data yang akurat agar dapat memahami kondisi sesungguhnya dari ketahanan pangan, baik di tingkat global dan nasional, dan tidak boleh membiarkan konflik dan perang, serta juga sanksi sepihak akan mengganggu rantai pasok pangan.

Sebelum memberikan kesempatan pada parlemen anggota MIKTA lainnya untuk memberikan pandangan dan pidatonya, Dr. (H.C.) Puan Maharani menggarisbawahi pentingnya diplomasi parlemen.

Dalam hal ini, diplomasi parlemen memainkan peran penting dalam mendorong kerja sama global. Kita harus menguatkan kerja sama dan kolaborasi dan berada di garda terdepan demi menjawab seluruh permasalahan yang kompleks dan saling terkait ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, negara-negara MIKTA dapat menjadi mekanisme yang sesuai untuk memobilisasi aksi-aksi global. Secara khusus, negara-negara MIKTA perlu mengambil posisi yang lebih strategis untuk mengatasi kerawanan pangan. Isu ini harus menjadi prioritas kita bersama. Memanfaatkan hubungan baik yang telah terjalin, negara-negara MIKTA juga selayaknya dapat melakukan mediasi konflik dan membuka dialog demi menciptakan rantai pasok global yang lebih berkelanjutan. Negara-negara MIKTA juga harus menjembantani kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, dan memastikan tidak ada satu negara pun yang tertinggal.

Terakhir, sebelum memberikan kesempatan kepada delegasi lainnya yang hadir, Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani berharap Konsultasi MIKTA ini dapat menghadirkan pendekatan baru, khususnya untuk isu-isu ketahanan pangan, kemiskinan dan perubahan iklim.

4. “Responsible AI and Emerging Technologies: Opportunities and Risks”

Pada sesi ke-4 Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, juga menyampaikan pidatonya yang menyoroti berbagai peluang dan tantangan atau resiko dari teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan.

Ketua DPR-RI menyampaikan bahwa kecerdasan buatan (AI) dan teknologi baru lainnya telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi pendorong utama inovasi, dan dapat memberikan solusi terhadap tantangan global yang tidak dapat diatasi saat ini.

Akan tetapi, teknologi seperti ini juga menghadirkan tantangan yang tidak boleh dilupakan, seperti contohnya serangan siber yang dimana dapat mengancam keamanan nasional. Lebih lanjut, kecerdasan buatan dan teknologi digital dapat mempengaruhi isu keamanan internasional. Senjata yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dapat memilih target tanpa otorisasi manusia. Selain itu, tidak semua orang memiliki kemampuan literasi, dan akses untuk memanfaatkan teknologi digital. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, karena mereka yang mampu akan lebih cepat mendapat manfaat.

Sebagai tambahan, Dr. (H.C.) Puan Maharani juga menyoroti meningkatnya jumlah ujaran kebencian, dan juga misinformasi dan disinformasi, yang dapat berdampak kepada kehidupan masyarakat

Oleh karena itu, sembari menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan AI dan teknologi baru lainnya, Dr. (H.C.) Puan Maharani menggarisbawahi pentingnya hukum dan aturan tentang teknologi untuk memperhatikan isu keamanan negara dan juga privasi pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, parlemen harus berperan untuk memaksimalkan peluang dari potensi kecerdasan buatan dan teknologi digital, dan mengatasi disinformasi, ancaman siber, dan penyalahgunaan *online*, menjamin keamanan dalam konektivitas infrastruktur. Dalam upaya menciptakan lingkungan teknologi yang aman, DPR RI telah mengesahkan undang-undang yang relevan, terutama terkait Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, mengurangi kesenjangan digital (*digital gap*), dan memberi akses yang sama bagi semua orang terhadap jaringan digital. Sebagai tambahan, perlu membahas dampak penggunaan kecerdasan buatan bagi keamanan internasional. Kerja sama internasional penting untuk dilakukan untuk membahas penggunaan senjata termasuk yang dilengkapi kecerdasan buatan.

Di akhir pidatonya, Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong semua negara-negara MIKTA untuk bekerja sama dan berkontribusi bagi pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi digital yang aman.

5. “Parliamentary Diplomacy and Global Interdependence in a Rapidly Changing Global Landscape”

Pada sesi berjudul “*Parliamentary Diplomacy and Global Interdependence in a Rapidly Changing Global Landscape*”, Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan bahwa globalisasi telah membuat hubungan antar negara menjadi semakin saling bergantung satu sama lain. MIKTA juga terbentuk dari adanya proses kerja sama internasional yang semakin erat dan adanya saling ketergantungan antar negara.

Dalam hal ini, saling ketergantungan antar negara-negara MIKTA telah berperan penting dalam mengakselerasi arus perdagangan, investasi, dan juga mobilitas manusia di antara negara MIKTA. Namun sejalan dengan terjadinya pandemi, dan juga meningkatnya rivalitas antar kekuatan besar, maka telah terjadi tantangan terhadap globalisasi.

Beberapa pihak menyatakan bahwa sejak pandemi COVID-19 telah terjadi proses *deglobalisation, slowbalisation, decoupling, dan friend-shoring*. Ditambah lagi, saat ini kita hidup di dunia yang terbelah (*divided and fragmented world*).

Kita juga melihat terbelahnya kekuatan besar dunia di bidang teknologi digital. Hal ini kita alami disaat dunia menghadapi berbagai tantangan besar, dari pemulihan paska pandemi, tantangan perubahan iklim, dan ketahanan pangan dan energi, dan bahkan perang di Ukraina.

Selain itu, sisi negatif dari berlanjutnya perang dan konflik saat ini adalah menjadikan risiko perang nuklir menjadi semakin tinggi. Dalam menghadapi berbagai tantangan global dan dunia yang terpecah belah, Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus memberi kontribusi dan menjadi bagian dari solusi, terlebih karena potensinya untuk menjembatani perbedaan.

Saat ini, parlemen harus lebih aktif melakukan diskusi pada tingkat internasional. Karena berbagai masalah internasional telah berdampak langsung pada rakyat yang memilih kita. Diplomasi parlemen juga dapat langsung membawa suara rakyat ke dunia internasional. Sebaliknya juga parlemen dapat membawa berbagai kesepakatan internasional ke tingkat lokal. Lebih lanjut, sang Ketua DPR RI menyampaikan bahwa saat ini kita memerlukan diplomasi yang melibatkan berbagai pihak terkait dan tidak hanya pemerintah, tetap juga berbagai pemangku kepentingan, untuk menangani berbagai isu internasional.

Masalah dan krisis global yang dihadapi juga semakin kompleks, saling terkait, dan bersifat multidimensi, sehingga kontribusi parlemen akan sangat membantu. Masalah yang terjadi juga berskala global, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, dah harus mengedankan kerja sama. Pada akhir pidatonya, Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong anggota Parlemen MIKTA untuk bekerja sama guna memperkuat multilateralisme.

6. Sesi Penutupan dan Dokumen Joint Statement

Pada sesi penutupan, seluruh delegasi telah menyetujui dokumen pernyataan bersama yang sebelumnya telah ditinjau dan diamendemen oleh para delegasi. Joint Statement tersebut berbunyi sebagai berikut:

“1. We, the Speakers of the Parliaments of the MIKTA countries (Mexico, Indonesia, Korea, Türkiye, and Australia) gathered in Istanbul on 9 March 2023 for the 8th MIKTA Speakers’ Consultation on “Multilateralism, Global Interdependence and Parliaments”, where we exchanged views on the challenges and opportunities facing national parliaments in the 21st century and discussed the importance of promoting multilateralism and addressing global interdependence.

2. We, the Speakers of the Parliaments of MIKTA countries, expressed our deepest condolences to the Turkish people and the Government of Türkiye for the loss of lives as a result of the earthquakes in Türkiye on 6 February 2023, one of the worst disasters in the country's history. We underlined that the strong solidarity shown by MIKTA countries by immediately deploying search and rescue teams and medical and humanitarian aid in the aftermath of the disaster is a welcome example of international cooperation in the face of disasters.

3. We underlined the importance of the MIKTA Speakers' Consultation, which serves as a valuable forum for MIKTA member countries to exchange views, share successful practices, and seek ways of cooperation especially on regional and global issues.

4. We emphasized that today's world has reached an unprecedented level of interconnectedness creating an increasingly interdependent and interrelated global community, and this kind of interdependence presents opportunities as well as challenges, especially as we are living in a fragmented world due to the rising global tensions that pose risks to the stability of global economy and security and that overcoming these challenges requires cooperation between countries, and that no country can solve these problems on its own.

5. In the face of increasingly complex global challenges, we reaffirmed that parliamentary diplomacy has become a crucial tool for building global dialogue and cooperation, and the role that national parliaments play in shaping international relations has become apparent.

6. Recognizing that the world is at a critical juncture and that the global security situation is under threat, we underlined that the international system and institutions are having difficulties in fulfilling their responsibilities to address ongoing challenges, such as the war in Ukraine and blatant provocations and threats posed by ballistic missile and nuclear programs against the wish of denuclearization in the Korean Peninsula as well as to prevent violence, restore peace, and ensure stability. We emphasized the need to strengthen the multilateral system and its institutions, in particular the United Nations, in order to better address these challenges and promote a more just and peaceful world order, and this will be possible through the reform of international institutions in the direction of enhancing democracy, accountability, representation, and efficiency, underpinned by the values of justice, pluralism and inclusiveness based on multilateralism, and invited the governments of the MIKTA member countries to take an active role in efforts towards reforming the international system.

7. We expressed our firm resolve to work together and our commitment to multilateralism in order to promote economic growth, social development and cultural exchange in support of

the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals agreed by all member states in 2015.

8. We noted that while artificial intelligence and other new technologies have significant potential to support human and economic development, improve quality of life and solve global challenges, they also pose risks, such as discrimination, privacy violations, cybersecurity threats and disruption of labor markets. We affirmed the importance of ensuring that these technologies are developed and used in a responsible and transparent manner, taking into account international human rights law and norms, ethical values and the public interest, and emphasized the importance of establishing international standards and guidelines for the design, development and use of these technologies, while recognizing the potential opportunities and risks involved. We invited international organizations to prepare standards and guidelines in this regard and to carry out this work in cooperation with national parliaments.

9. We underlined that wars, terrorism, environmental disasters, natural disasters, poverty and food access constraints, which tend to increase every year, are factors that increase irregular migration, and in the framework of the positive and/or negative impacts of irregular migration on countries of origin, transit and destination countries, it is necessary to determine policies for the future. The human rights dimension of irregular migration should be considered in developing these policies.

10. We noted with appreciation the humanitarian approach of Türkiye, the country hosting the largest number of refugees in the world.

11. We called on the international community to cooperate on refugee mobility that requires safe, proper and adequate management in order to reduce its potential of exacerbating regional and global challenges as well as to create an enabling environment to share the burden.

12. We called for combating all forms of discrimination including xenophobia, racism and Islamophobia which have been on the rise all over the world in recent years and have even been used by mainstream political movements.

13. We indicated that recent crises such as epidemics, natural disasters and wars do not remain only regional but can affect every part of the globe, threatening food security and supply chains in parallel with climate change, further impoverishing economically vulnerable groups, and noted that strengthening the role of parliaments, especially in ensuring food security, protecting supply chains, and countering the negative impacts of climate change, will also empower peoples.

14. We underlined the importance of the shipment of Ukrainian grain across the Black Sea in the context of food security and commended Türkiye for its initiatives and mediation for the signing of the Black Sea Grain Initiative with the UN.

15. Emphasizing the importance of deepening cooperation and coordination between MIKTA member countries, we expressed that relations in political, economic, cultural, and social spheres should be moved forward based on trust and mutual understanding, and we reiterated our strong will to use all the opportunities of parliamentary diplomacy in this direction.

16. We expressed our appreciation and gratitude to the Grand National Assembly of Türkiye for its steadfast leadership in chairing and hosting the MIKTA Speakers' Consultation, and look forward to closely working with the House of Representatives of the Republic of Indonesia during Indonesia's chairmanship of MIKTA in 2023, so as to further advance MIKTA's agenda and priorities."



Pada sesi terakhir ini, Ketua DPR-RI juga menerima estafet keketuaan Parlemen MIKTA selanjutnya, dari Parlemen Turki.

7. Pertemuan Bilateral dengan Ketua Majelis Agung Nasional Turkiye, Mustafa Sentop



Di sela-sela perhelatan the 8th MIKTA Speakers Consultation, Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani beserta anggota delegasi melakukan pertemuan Bilateral dengan Ketua Majelis Agung Nasional Turkiye, Prof. Dr. Mustafa Sentop.

Pada pertemuan ini, Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan belasungkawanya atas musibah gempa yang terjadi di Turkiye pada bulan Februari tahun ini, dan juga menyatakan ingin melengkapi dukungan Indonesia bagi penanganan pasca gempa, termasuk membawa vaksin dan serum tetanus. Selain itu, Puan juga menyampaikan apresiasi untuk Majelis Agung Nasional Turki atas keberhasilannya menyelenggarakan the *8th MIKTA Speaker's Consultation*.

Pada kesempatan ini, Dr. (H.C.) Puan Maharani juga mengapresiasi kerja sama bilateral Indonesia dan Turki yang telah mengalami pertumbuhan sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan berharap kesepakatan-kesepakatan kerja sama penting dalam pertemuan tersebut di bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, serta riset dan teknologi dapat segera diimplementasikan.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI berharap untuk memperkuat kerja sama di antara kedua parlemen. Puan meyakini, jika kerja sama antar parlemen kuat, maka hubungan bilateral Indonesia dan Turki juga akan lebih kokoh. Melalui pertemuan ini, Dr. (H.C.) Puan Maharani juga meminta dukungan Parlemen Turkiye dalam keketuaan kami di forum-forum internasional karena DPR RI.



Selain itu, Dr. (H.C.) Puan Maharani menyinggung isu perempuan dan kesetaraan gender, karena kesetaraan gender adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan dunia yang damai dan stabil.

Dr. (H.C.) Puan Maharani juga mendorong agar parlemen Indonesia dan parlemen Turki untuk memperkuat kerja sama untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sehubungan dengan ini, penting untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang politik, sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih inklusif.

Terkait kerja sama ekonomi, Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan kegembiraannya atas hubungan kerja sama Indonesia dan Turki yang mengalami pertumbuhan pesat dalam 3 tahun terakhir. Volume perdagangan kedua negara mengalami pertumbuhan rata-rata 30 persen pertahun, dan saat ini nilainya sudah mencapai lebih dari USD 3 miliar.

Dr. (H.C.) Puan Maharani juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Turki perlu segera menyelesaikan perundingan *Indonesia-Turkiye Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)*.

Lewat kesempatan ini, Ketua DPR RI juga menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi untuk pemerintah Turki terhadap Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dengan mengubah nama jalan di depan KBRI Ankara dari yang semula bernama Jalan Belanda (Holanda Cadesi) menjadi Jalan Sukarno.

HASIL YANG DICAPAI

8th MIKTA Speakers Consultation yang diselenggarakan secara luring atau fisik di Istanbul ini menghasilkan *Joint Statement* (pernyataan bersama) seperti yang telah disampaikan diatas, dan mencakup isu-isu yang dibahas selama persidangan diantara lainnya seperti teknologi, konflik dan perang, ketahanan pangan, perubahan iklim, migrasi, dan pentingnya reformasi lembaga atau organisasi internasional beserta sistemnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. 8th MIKTA Speakers Consultation yang diselenggarakan secara luring/fisik di Istanbul, Turkiye telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, dapat memberikan pandangannya pada topik-topik di lima sesi tersebut secara rinci, dan lebih dari itu, *Joint Statement* dihasilkan sesuai kesepakatan bersama.
2. Partisipasi Delegasi DPR RI yang diketuai oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani merupakan wujud nyata komitmen DPR RI dalam memperkuat multilateralisme dan meningkatkan relevansi MIKTA di mata dunia.
3. DPR RI telah menerima giliran untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation yang ke-9 yang juga akan dilaksanakan pada tahun ini.

SARAN

1. Hasil pertemuan the 8th MIKTA Speakers Consultation berupa Joint Statement memerlukan tindak lanjut implementasi dari seluruh anggota parlemen MIKTA, termasuk DPR RI. Oleh karena itu, *Joint Statement* tersebut sebaiknya tidak hanya didiskusikan saat pertemuan dengan delegasi Parlemen Anggota MIKTA sebagai tindak lanjut, akan tetapi juga segera didistribusikan ke komisi-komisi yang terkait di DPR RI karena topik dan isu yang dibahas juga berkaitan dengan bidang di komisi-komisi tersebut.
2. Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional perlu segera mempersiapkan pelaksanaan the 9th MIKTA Speakers Consultation.

3. Pemilihan tema the 9th MIKTA Speakers Consultation diharapkan selaras dengan pembahasan pertemuan MIKTA Leaders' Gathering, walaupun tentunya tetap mengedepankan perspektif parlemen.

PENUTUP

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga tujuan dan misi dari Delegasi di perlihatkan 8th MIKTA Speakers Consultation tercapai dan sukses.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, Turkiye beserta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istambul atas dukungan substansi dan pendampingan selama pertemuan berlangsung.

KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- *Joint Statement*
- *Klipping berita*

KATA PENUTUP

Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI menghadiri the 8th MIKTA Speakers Consultation di Istanbul, Turkiye. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban Parlemen untuk terbuka (*open*) dan transparan kepada publik. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 10 Maret 2023

Ketua Delegasi

Dr. (H.C) Puan Maharani